

Peran Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Dalam Pengelolaan Aset Tanah Dan Bangunan Di Kabupaten Aceh Selatan

Wirda Aceh

Universitas Teuku Umar

Email Adress : sellarozatulmukminah@gmail.com, yasrizal@utu.ac.id

Received : 26 Agustus 2022

Revised : 30 Agustus 2022

Accepted : 01 September 2022

ABSTRAK

Pengelolaan Aset di Kabupaten Aceh Selatan sudah sangat baik dimana sudah terdapat beberapa aset daerah yang sudah dijalankan dengan baik sehingga memberikan pemasukan ekonomi bagi pemerintah daerah. Tujuan penelitian ini adalah memberikan informasi dan wawasan terhadap masyarakat. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan induktif agar penulis dapat menjelaskan secara terstruktur tentang peristiwa dan fenomena yang terjadi. Pengelolaan aset daerah sangat penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan pemerintah daerah kabupaten Aceh Selatan.

PENDAHULUAN

Badan pengelolaan aset wilayah artinya unsur pelaksana teknis pada bidang penilaian, pemamfaatan serta pemeliharaan, inpentarisasi serta penghapusan serta pada bidang analisis kebutuhan aset dalam pengelolaan keuangan serta bangunan pada Kabupaten Aceh Selatan. Tujuan diaturnya keuangan dan aset wilayah sang pemda buat menaikkan efesiensi dan efektivitas pada mengelola sumber daya keuangan serta aset daerah. Namun jua dapat menaikkan kesejahteraan daerah serta mengoptimalkan pelayanan kepada warga . Terciptanya

efisiensi efektivitas penggunaan aset daerah, pengamanan aset wilayah serta data berita yg seksama tentang jumlah kekayaan dan jumlah aset-aset.

Aset daerah ialah seluruh kekayaan wilayah yang di punyai Pemda atau dibeli ataupun diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, misalnya sumbangan, bantuan gratis, wakaf, kontribusi , hadiah, swadaya, kewajiban pihak ketiga, serta sebagainya. Aset dari peraturan pemerintah No 71 Tahun 2010 merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasi serta atau dimiliki oleh pemerintah menjadi akibat berasal insiden masa lalu serta dari mana manfaat ekonomi serta atau sosial dimasa depan dibutuhkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun warga .

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

(Wijaya et al., 2019)Aset pemerintahan daerah ialah segala kepunyaan atau bentuk dari kekayaan atau bahkan sumber daya ekonomi yang dikuasai pemerintah daerah. Kekayaan tersebut dituangkan dalam neraca berupa aset yang terdiri dari aset lancar, aset tetap dan aset lainnya, Barang milik daerah termasuk aset tetap.

(Kantor & Provinsi, 2017)Badan pengelola keuangan dan aset daerah ialah instansi pemerintah yang bertugas pada mengelola keuangan serta aset daerah melalui dari penganggaran hingga pertanggung jawaban APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah). Fungsi serta pertanggung jawaban badan pengelolaan aset wilayah di penyelenggaraan, training, fasilitas, monitoring, evaluasi, koordinasi dan pengendalian administrasi pembendaharaan dan kas wilayah, aturan, akuntansi serta aset dan hukum keuangan wilayah Kabupaten/Kota, sekaligus adalah identitas masa depan, artikulasi citra, nilai, arah serta tujuan yang akan memandu masa depan yang realistik dan kredibel dan menjadi budaya organisasi.

(Diskursus & Virus, 2021)Wujud konkret pemerintah pada sumber daya negara dalam undang-undang tidak resmi no. 27 Tahun 2014 Deklarasi tentang Penatausahaan Barang Milik/Lokal. Dalam rencana permainan ini, mengawasi sumber daya hanya secara eksklusif, namun mengkaji lebih lanjut tentang sumber daya dan bagaimana membangun kemahiran dan kecukupan dan penghargaan tambahan dalam mengawasi sumber daya negara bagian/teritorial dari mana pedoman ini diperluas dari Pedoman Usaha Rumah Tangga No. Dalam pedoman ini Penatausahaan barang milik daerah harus dilengkapi dengan kemanfaatan, pedoman, keterusterangan, keefektifan, tanggung jawab, dan kepastian nilai.

(Hertanto, 2006)Pemda dijelaskan bahwa pemerintah daerah diberi keleluasaan dalam mengatur mangurus rumah tangga daerahnya sendiri, menetapkan kebijaksanaan sendiri serta melakukan pembiayaan dan pertanggung jawaban keuangan sendiri.

(Pinatik et al., 2015)Sumber daya tetap merupakan salah satu komponen yang harus diawasi secara tepat untuk menyampaikan data yang dapat diandalkan dalam laporan moneter teritorial. Sumber daya tetap teritorial dewan adalah pekerjaan untuk meningkatkan produktivitas, kelangsungan hidup, dan membangun nilai tambah dalam mengawasi sumber daya, sebagai modal awal untuk administrasi pemerintahan negara bagian terdekat untuk mengembangkan kemampuan keuangan mereka dan untuk membantu pekerjaan dan kemampuan legislatif lingkungan sebagai pemasok administrasi publik kepada penduduk.

(Tukunang, 2016)Sampai saat ini, pengelolaan sumber daya teritorial telah berjalan, namun belum dilakukan tergantung pada situasi untuk mencapai kenyamanan dan dampak pepatah, sebagai pedoman diharapkan dapat mengarahkan pelaksanaan sumber daya lokal para eksekutif. Namun lama penyelenggaraan Inventarisasi Daerah dilakukan berdasarkan pengaturan Pendeta Usaha Rumah Tangga Nomor 32 Tahun 1998 Pergub 7 Tahun 1997 sebagai Undang-undang Pokok Perbekalan Produk Pemerintah Daerah.

(Purba, 2019)Pemanfaatan sumber daya mengandung pengertian penggunaan barang milik daerah yang tidak dimanfaatkan untuk pelaksanaan kewajiban dan kemampuan pemerintah serta peningkatan sumber daya tetap daerah dengan tidak mengubah status penguasaannya. untuk objek penggunaan sebagai tanah dan bangunan harus dimungkinkan secara keseluruhan atau sampai batas tertentu bergantung pada luas tanah dan bangunan yang digunakan. Penggunaan sumber daya tetap daerah dilengkapi dengan perenungan khusus dengan mempertimbangkan kepentingan kabupaten serta kepentingan masyarakat umum. Pemanfaatan sumber daya teritorial dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan kewajiban dan unsur penyelenggara pemerintahan. pemeliharaan dan keamanan sumber daya yang menjadi objek penggunaan dalam kerumunan penggunaan.

Adapun indikator dalam pengelolaan barang milik negara/daerah meliputi: (a). Perencanaan kebutuhan dan penganggaran (b). Pengadaan (c). Penggunaan dan pemanfaatan (d). Pengamanan dan pemeliharaan.

METODE PENELITIAN

Pada pelaksanaan penelitian ini, penulis memakai metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif menggunakan pendekatan induktif agar penulis dapat mengungkapkan secara

terstruktur perihal insiden serta fenomena yang terjadi. Dari Creswell (2016:21) penelitian kualitatif menyebutkan bahwa “penelitian kualitatif artinya metode buat mengeksplorasi menggunakan maknanya yang diungkap dari satu konflik sosial. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan banyak sekali upaya penting mirip mengajukan pertanyaan, mengumpulkan, serta menganalisis data”.

a. Lokasi penelitian

Penelitian ini berlokasi di BPKD Kabupaten Aceh Selatan .

b. Narasumber

Penelitian ini memerlukan orang atau pelaku yang di amati untuk mendapatkan informasi serta data yang di perlukan dalam penelitian.

- Pegawai Honorer dan Pegawai ASN di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

c. Teknik pengumpulan data

- Survey/Observasi

Penelitian ini langsung turun kelapangan untuk mendapatkan informasi serta data-data yang akurat baik dari fenomena sosial atau permasalahan sosial di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

- Wawancara

Peneliti mewawancarai langsung pegawai Honorer dan ASN di kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan guna mendapatkan informasi, data-data yang sesuai penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran

Perencanaan kebutuhan serta penganggaran barang milik negara/daerah diatur dalam ketentuan pasal 9-pasal 11 peraturan pemerintah N0. 27 Tahun 2014 tentang penatausahaan barang milik negara/daerah. Penataan kebutuhan adalah gerakan untuk membentuk seluk-beluk milik negara/provinsi untuk menghubungkan perolehan masa lalu yang melibatkan keadaan saat ini sebagai alasan untuk melakukan gerakan di masa depan. Mengantisipasi kebutuhan negara bagian/lokal diarahkan oleh prinsip barang dagangan, pedoman kebutuhan, dan norma biaya. Menurut Pegawai (PNS) mengatakan bahwa “dalam pengelolaan aset daerah sistem perencanaan dan kebutuhan anggaran, sistem perencanaan kebutuhannya boleh dititik beratkan pada

kebutuhan yang diperlukan tiap-tiap SKPD penggarannya sudah masuk dalam DPA tahun berjalan di BKPD (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) sedangkan menurut masyarakat mengatakan bahwa “sistem perencanaan dan penggaran dalam mengelola aset daerah harus baik dalam penggunaan aset daerah khususnya di Aceh Selatan dan pengamanan aset daerah serta tersedianya data atau informasi yang akurat mengenai kekayaan aset daerah. Menurut Pegawai (Honorar) menjelaskan bahwa pengelolaan aset daerah serta sistem perencanaan kebutuhan dan penganggaran dalam mengelola aset daerah cukup bagus karena melakukan perencanaan yang sangat baik. Hal yang berbeda disampaikan oleh masyarakat mengatakan bahwa aset daerah serta sistem perencanaan kebutuhan dan penganggaran tidak cukup bagus, karena cara pengelolaan asetnya kebanyakan curang ataupun banyak pengeluaran yang tidak penting.

B. Pengadaan

Pengadaan ialah proses atau kegiatan dalam memenuhi serta menyediakan kebutuhan dan pasokan tenaga kerja dan produk berdasarkan kesepakatan atau langsung untuk mengatasi masalah akuisisi/administrasi pada dasarnya adalah pekerjaan klien untuk mendapatkan dan memahami tenaga kerja dan produk yang mereka butuhkan. Menurut Pegawai (PNS) mengatakan bahwa “sistem dari pengadaan aset daerah bisa didapatkan dengan melalui lelang atau penunjukan langsung oleh SKPD yang bersangkutan.

Pengadaan barang atau jasa biasanya di perhitungkan dengan baik oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah diperhitungkan setiap tahun anggaran apa yang harus di adakan seperti barang atau jasa.

Pengadaan barang dan jasa sayang di perlukan dalam upaya mengadakan aset daerah, aset tetap atau aset berjalan menjadi salah satu pemasukan ekonomi di Kabupaten Aceh Selatan, dengan berjalannya roda ekonomi pemerintah daerah kabupaten Aceh Selatan terutama dari aset aset pemerintah daerah yang berjalan dengan baik.

C. Penggunaan dan pemanfaatan

Penggunaan barang dagangan provinsi adalah penggunaan produk teritorial yang digunakan untuk menyelesaikan kewajiban dan elemen perakitan mekanik lokal atau meningkatkan properti provinsi dengan mengubah status kepemilikan. Sesuai PMK Nomor 155/PMK.06/2020 atribut dan penjelasan yang berkaitan dengan jenis penggunaan barang milik negara, misalnya penggunaan, penggunaan kerjasama, struktur untuk menyerahkan, dan kerangka pengaturan. Menurut Pegawai (PNS)

mengatakan bahwa "Sistem penggunaan saat ini cukup baik, aset peralatan kantor Digunakan karyawan untuk bekerja. akan tetapi kurangnya Pemanfaatan aset tersebut bagi karyawan" namun hal yang berbeda di sampaikan oleh masyarakat mengatakan bahwa pemanfaatan dan penggunaan aset daerah sangat tidak baik masih banyak aset-aset yang harus di manfaatkan untuk menambah pemasukan bagi dari yang mengikatkan ekonomi daerah seperti APBD anggaran pendapatan belanja daerah.

Aset daerah seharusnya di jalankan dan di pergunakan dengan baik agar bisa menjadi hasil yang baik bagi suatu daerah, pemanfaatan aset yang baik akan menimbulkan hasil dari aset tersebut seperti pertumbuhan ekonomi atau peningkatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Selatan. Upaya penggunaan aset dan pemanfaatan aset harus di awasi dan di buat sebaik mungkin agar memberikan manfaat bagi daerah.

D. Pengamanan dan Pemeliharaan

Pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah ialah bagian dari pengelolaan aset daerah selain perencanaan kebutuhan dan penganggaran pengamanan dan pemeliharaan di lakukan ialah untuk mencegah terjadinya penurunan kualitas dan fungsi barang, penurunan jumlah barang, atau barang hilang. Pengamanan aset ialah kegiatan atau tindakan pengendalian dan penertiban dalam upaya pengurusan barang milik negara atau daerah secara fisik administratif dan tindakan hukum.

Menurut Pegawai (PNS) mengatakan bahwa " Pengamanan dan pemeliharaan aset daerah di kabupaten Aceh Selatan sudah sangat bagus di mana beberapa aset di jaga ketat dan di arsipkan oleh Banda Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Hal ini membuat sistem pengamanan dan pemeliharaan aset tetap atau aset berjalan di Kabupaten Aceh Selatan.

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan sangat baik dalam pengelolaannya, beberapa hasil wawancara sudah banyak, aset aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan yang sudah di manfaatkan secara baik, Perekonomian yang baik di dalam pemerintahan daerah akan lebih meningkatkan jika aset daerah berjalan dengan baik, pemasukan dari aset daerah menjadi pusat penghasilan bagi penambah ekonomi pemerintah daerah kabupaten Aceh Selatan. Keterbatasan penelitian ini adalah data yang menjadi rahasia negara atau pemerintah daerah yang tidak dapat di informasikan ke publik. Saran untuk Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan upayakan terus menjalankan aset daerah untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih saya ucapkan kepada masyarakat dan pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Selatan sudah mengizinkan saya dalam meneliti semoga penelitian ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Aceh Selatan.

REFERENSI

- Diskursus, D., & Virus, P. (2021). *KINERJA ORGANISASI DALAM PENATAUSAHAAN ASET TETAP DI KANTOR BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN*. 19.
- Hertanto, Y. (2006). PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) KEUANGAN TERHADAP EFEKTIVITAS PELAPORAN KEUANGAN (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Di Kabupaten Blitar). 1999(December), 1–6.
- Kantor, P., & Provinsi, P. (2017). *PERAN KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) PADA KANTOR PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA*.
- Pinatik, S., Ilat, V., & Kolinug, M. (2015). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tomohon. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1), 818–830. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/7556>
- Purba, R. (2019). Pengelolaan Aset Tetap Daerah Dalam Mengoptimalkan Pemanfaatan aset Daerah. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 9(2), 152–164.
- Tukunang, S. C. F. (2016). Manajemen Aset Daerah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro Areas. *Jurnal EMBA*, 4(2), 236–253.
- Wijaya, A., Studi, P., Pemerintahan, I., Ilmu, F., Dan, S., & Riau, U. I. (2019). *PERAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DALAM PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN ASET DAERAH DI KABUPATEN ROKAN HULU*.